BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan secara langsung bukanlah hal yang baru bagi rakyat Indonesia, karena sebelumnya pemilihan Calon /wakil Gubernur Sumatera sudah terlaksana pada tahun 2008 dapat memberi pelajaran bagi masyarakat. Penggunaan hak pilih masyarakat Labuhan Batu pada Pilgubsu 2008 berkisar hanya 71,46% yang menggunakan hak pilihnya. Oleh sebab itu seharusnya bisa jadi pelajaran bagi Pilgub 2013 agar tidak banyak lagi masyarakat Golput. Tapi kenyataan Pilgub 2013 masyarakat Di Desa PTPN III Janji Kecamatan Bilah Barat hanya 51 % yang menggunakan hak pilih suaranya. Ternyata Golput tahun 2013 lebih besar.

Pada tanggal 7 Maret 2013 yang lalu, rakyat Sumatera Utara melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur salah satu bentuk demokrasi salah satu bentuk perubahan demokrasi. Dari pemilu ternyata Calon No.5 yang menang yaitu Gatot Pujo Nugroho dan wakilnya Tengku Eri Nuradi.

Jumlah penduduk Desa janji sebanyak 5.705 orang terdiri dari 1345 Kepala Keluarga dengan agama yang dianut sekitar 80 % islam atau sekitar 4.567 orang sedangkan dari Desa Afd. I Kecamatan Bilah Barat Jalan Jati Emplasmen PTPN III Kebun Kabupaten Labuhab Batu Induk dengan jumlah penduduku 2.046 orang atau 451 KK agama yang dianut sekitar 80 % islam atau sekitar 1.637 orang.

Dari data deskriftif diatas dapat dilihat karakteristik masyarakat dan demography yang hampir sama bekerja dan tinggal di kebun, jika telusuri lebih jauh perilaku masyarakat di kedua wilayah tersebut hampir sama pula dimana sistem foedalisme kental mempengaruhi kehidupan kepala keluarga dan anggotanya, jika sewaktu-waktu pimpinan disana memilih, menyarankan dan memberikan janji-janji yang manis maka dapat dipastikan mereka akan mematuhi dan taat anjuran dan perintah dan saran pimpinan disana. Karena penduduk merasa takut kalau tidak mengikuti permintaan tersebut mereka akan dipersulit atau dipecat dari posisi dan jabatan yang dipegang. Mayoritas kedua wilayah tersebut beragama islam. Jika dilihat perilaku masyarakat di Desa Afd.I Kecamatan Bilah Barat Jalan Jati Emplasmen PTPN III Kebun Kabupaten Labuhan Batu Induk masih rendah, tentang pelajaran politik mengenai pemilu masih karena penduduknya masih banyak, orang tua. Biasanya orang tua memilih berdasarkan siapa calon yang rajin beribadah dan mengasih infak. Di Labuhan batu ikatan marga sangatlah kuat, maka banyak masyarakat memilik karena semarga karena menurut masyarakat mampu membawah kearah yang lebih baik. Sedangkan untuk yang PNS mereka disuruh dari atas untuk memilih calon yang dipilihkan, mau tidak mau PNS harus ikut. Khususnya di Desa Afd. I Kecamatan Bilah Barat tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang karena pendidikanya rata-rata lulusan SD, SMP, SMU. Jika tim sukses Gatot Pujo Nugroho berhasil mendekati pimpinan Desa Janji dan Pimpinan PTPN III (Persero) maka kemungkinan besar mereka akan memenangkan pemilihan disana,

apalagi didukung pula Gatot merupakan calon incumben (masih menjabat) maka dapat mempergunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih disana.

Sebagian masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemilu dan pendidikan politik di Kabupaten Labuhan Batu Induk, membuat banyaknya terjadi Golput di masyarakat. Adanya sebagian masyarakat golput adalah karena mereka malas untuk memilih atau memang sudah muak dengan keadaan proses pemilihan umum itu sendiri, karena proses pendidikan politik dan seharusnya sudah dilakukan baik melalui media maupun sosialisasi. Mungkin pemerintah harus membuat program seperti seminar tentang pemilu di daerah dengan melibatkan para tokoh diberbagai lapisan untuk memberikan kesadaran tentang berpolitik.

Memilih suatu calon merupakan hak, memilih calon tidak hanya karena jabatan, marga atau memberi sumbangan tapi pilihlah yang bermutu karena ilmunya agar bisa merubah bangsa Indonesia menuju arah yang baik. Masyarakat dapat menilai kinerja kandidat, *image*, ideologi, pendidikan terakhir, pemilih adalah subjek politik yang harus mencontreng dengan benar bukan karena calon mana yang bisa menggandeng orang yang kharismatik, disinilah pemilih jadi agen pembaharuan bagi negara ini.

Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Mulai penataan sistem

dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat benar diwujudkan.

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) langsung diharapkan menghasilkan *figure* kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas untuk menciptakan pemilukada yang *free* dan *fair*, disamping perlu adanya berbagai aturan main yang jelas dan demokratis, juga dibutuhkan para pelaksana yang bijaksana seperti yang disebutkan dalam uraian sebelumnya, untuk menciptakan pemilukada yang jujur dan adil bukan hanya dapat dilihat dari sistem pemilukada, tetapi juga bisa dilihat dari sisi proses pemilukada.

Agar pemilu dapat menjadi wahana kedaulatan rakyat dan hasilnya benar merupakan bentuk kehendak rakyat, UUD 1945 telah menggariskan asas pemilu, yaitu jujur dan adil para pemilih juga dapat menggunakan haknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas ini tentu saja harus mewujud dalam sistem apa pun yang dipilih sebaliknya pemilihan sistem dan penyelenggaraan pemilu juga harus mempertimbangkan sistem mana yang paling mencerminkan kejujuran dan keadilan. Karena kalau salah sistem dalam pemilu akan dapat berdampak buruk bagi bangsa ini.

Pemilihan umum sebagai pencapaian tertinggi dari sebuah proses politik di suatu negara memang merupakan indikator paling akurat untuk mengukur derajat demokratis sebuah bangsa. Dalam masa transisi menuju demokrasi seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat masih banyak terjadi. Mekanisme demokrasi, seperti Pemilu dan sebagainya masih jauh dari sempurna dan belum menjamin

terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Persoalan paling banyak muncul di Indonesia akhir ini terdapat dalam mekanisme Pemilukada.

Praktek politik uang ini sangat tertutup yang hanya diketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada "*ring* dalam " para calon saja. Dalam permainan politik uang, seorang calon Kepala Daerah beserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakukan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarannya.

Pada proses pemilihan, bagi mereka yang terlibat dalam paktek politik uang juga menyediakan dana khusus dalam perkenalan ini. Bagi bakal calon yang "paham betul" dengan situasi lapangan dan disertai kondisi dana yang mencukupi telah menyediakan dana pada masa perkenalan ini. Penulis menemukan suatu pola bahwa tidak selamanya praktik politik uang terjadi semata-mata menjelang pemilihan. Pemberian uang dapat dilakukan jauh sebelum Pemilihan bahkan seorang diikuti sebelum ia menjadi anggota dewan. Dengan sistem ini jauh sebelumnya terhadap seseorang telah dilakukan pendekatan sedemikian rupa seseorang, semua kebutuhan besar dipenuhi. Selain itu ternyata pemberian uang tidak perlu selalu dilakukan oleh para calon. Pemberian uang dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis dan seterusnya. Sebaiknya pemerintah harus berlaku tegas pada calon yang melakukan curang.

Pemberian uang ini dilakukan untuk menarik simpati sekaligus untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan bakal calon yang *bonafit*. Tidak setiap perkenalan membutuhkan dana. Biasanya dana perkenalan hanya

diberikan apabila ada "*feeling*" suara tersebut dapat dibeli. Namun, tidak semua bakal calon menyediakan dana pada tahap perkenalan ini baik karena ketidaktahuannya atau karena perhitungan yang matang.

Tapi sayangnya setelah memenagkan pemilu, mudah sekali kontestan melupakan janji dan harapan politik yang telah mereka umbar di hadapan para pemilih. Mereka hanya mengurusi distribusi kekuasaan untuk mengamankan posisi yang telah didapat. Sementara itu pemilih kerap juga berpindah-pindah dukungan dari kontestan ke kontestan yang lain.

Agar pemilukada dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat, dibutuhkan sistem, prosedur dan perangkat yang tepat. keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari peranan aparat pelaksanaanya, yaitu jajaranya KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), mulai dari seketariat Panwas (Panitia Pengawasan), PPS (Panitia Pemungutan Suara).

Dari uraian di atas dapat dijadikan Sebagai pelajaran untuk menambah wawasan pengetahuan tentang politik bahwa untuk memilih pemimpin haruslah berdasarkan kecerdasan, bukan karena pemberian hadiah .

Dari uraian di atas penulis merasa penting untuk meneliti sejauhmana perilaku mayarakat dalam memilih pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur dapun judul yang akan diteliti oleh penulis adalah"**Perilaku Masyarakat Dalam Memilih Pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Periode (2013- 2018) di Desa Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Jalan Jati Emplasmen PTPN III Kebun Kabupaten Labuhan Batu Induk**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perilaku memilih masyarakat calon Gubernur dan calon wakil Gubernur periode 2013-2018 PTPN III Di Desa PTPN III Janji Kelurahan Afdeling I Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Induk
2. Cara yang dilakukan kandidat untuk merebut hati rakyat dalam pemilukada.
3. Meminimalisir praktik percaloan seperti *money politic*.
4. Kendala yang dihadapi para penyelenggara dalam mengelola pelaksanaan pemilukada baik pemilihan Bupati/ Walikota maupun gubernur.
5. Mendesain pemilukada propinsi maupun kabupaten kota berdasarkan pemilu sebelumnya.

C. Pembatasan Masalah

Dalam memusatkan penelitian agar mencapai hasil yang diinginkan, penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

Perilaku memilih masyarakat calon Gubernur dan calon wakil Gubernur periode 2013- 2018 Di Desa Afd. I Kecamatan Bilah Barat Jalan Jati Emplasmen PTPN III Kebun Kabupaten Labuhan Batu Induk.

D. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perilaku memilih masyarakat calon Gubernur dan calon wakil Gubernur periode 2013- 2018 Di Desa Afd. I Kecamatan Bilah Barat Jalan Jati Emplasmen PTPN III Kebun Kabupaten Labuhan Batu Induk?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Perilaku memilih masyarakat calon Gubernur dan calon wakil Gubernur periode 2013- 2018 Di Desa Afd. I Kecamatan Bilah Barat Jalan Jati Emplasmen PTPN III Kebun Kabupaten Labuhan Batu Induk.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bermanfaat untuk:

a. Bagi Masyarakat

Setelah memperoleh informasi dari penelitian ini maka masyarakat dapat menambah wawasan tentang pentingnya pemahaman tentang ilmu politik. Karena dengan adanya pemahaman ilmu politik, pemilih sebagai subjek politik tidak akan salah memilih dalam pemilu, karena kalau subjek politik salah dalam memilih akan berdampak buruk pada negara ini.

b. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam mengatasi kandidat yang berbuat curang dalam pemilu, agar tidak terdapat lagi oknum- oknum yang akan melakukan curang agar pemilu calon Gubernur dan calon wakil Gubernur. Agar pemilu tahun depan agar lancar juga dengan mendesain pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Dan bagi pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan untuk memberi pemahaman tentang ilmu politik dan mengajari cara memilih kandidat yang benar. Dan lebih memberi sarana buku, alat peraga. Alat peraga bisa digunakan dengan kertas buram di bawah untuk mengajari anak yang suduh cukup umur untuk mencontreng. Dengan adanya isi mengenai pemilihan kepala daerah membuat wawasan cakrawala guru lebih luas, dalam pengajaran anak disekolah.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti fenomena politik yang terjadi, sehingga menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti, dengan adanya tulisan skripsi ini membuat saya lebih tahu tentang tata cara dalam pemilukada.

Dan kata-kata yang asing di dalam politik, masyarkat jadi tahu tentang pemilihan umum karena sering membaca. Dan ini adalah langkah awal untuk lebih giat lagi dalam membaca buku karena itu akan menambahkan pengetahuan bagi saya. Tulisan ini menambah pengetahuan penulis lebih tahu banyak tentang pemilu.

THE Character Building UNIVERSITY